

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu sesuai akte pendirian pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992, dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil dari kinerja Tim Perbankan MUI. Tim Perbankan MUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Pada tanggal 18 hingga tanggal 20 Agustus 1990 mereka menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hasil lokakarya dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta tanggal 22 hingga tanggal 25 Agustus 1990, dan menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia.

Sebelumnya, pada tahun 1983 pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Saat itu kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi dibidang keuangan dan moneter berupa Paket Kebijakan 1 Juni 1983 untuk

mendorong kemandirian dunia perbankan. Kemudian pemerintah menganggap bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan dan pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 atau yang disebut dengan Pakto 88. Adanya Pakto 88 dapat memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru terutama bank dengan sistem bagi hasil, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Keberadaan bank syariah pada awal masa operasinya belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" dalam UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi bank-bank konvensional untuk memberikan layanan dengan konsep syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Akibatnya banyak bank-bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya.

Kemudian, pada tahun 1999 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disahkan. Dalam UU tersebut menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua UU tersebut menjadi amanah bagi Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kemudian disahkan beberapa produk perbankan syariah dalam perundangan yang memberikan kepastian hukum dan dapat meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, sehingga industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan dapat mendorong pertumbuhannya.⁴⁰

2. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Saat Ini

Perbankan syariah di Indonesia diarahkan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi

⁴⁰ Bank Indonesia, *Perbankan Syariah*,
<http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> , diakses pada 21 Juli 2017

perekonomian Indonesia. Saat ini bank syariah di Indonesia semakin berkembang pesat, meskipun sempat mengalami periode suram sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2015. Pada periode tersebut kinerja ekonomi Indonesia sedang mengalami perlambatan dibanding dengan tahun sebelumnya, sehingga kinerja perbankan pun menurun mengikuti siklus bisnis. Namun pada tahun 2016, perbankan syariah mulai menunjukkan tren positifnya.

Tercatat pada Desember 2016 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13 bank dengan total aset Rp 254.184 Triliun, sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah sebanyak 21 bank dengan total aset sebesar Rp 102.320 Triliun. Pertumbuhan aset perbankan syariah nasional juga tidak terlepas dari kontribusi tiga bank syariah dan satu unit usaha syariah (UUS) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, serta BTN Syariah. Dari sisi pembiayaan perbankan syariah juga mencatat peningkatan 16,40 persen menjadi Rp 249,09 Triliun, dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya Rp 213,99 Triliun. Pertumbuhan perbankan syariah juga bisa dilihat dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) dimana pada Desember 2016 mencapai Rp 279,33 Triliun, naik 20,83 persen dari posisi Desember 2015 sebesar Rp 231,17 Triliun. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Selain itu, NPF gross perbankan syariah juga susut ke angka 4,42% dari posisi NPF di 2015 yang berada di angka 4,84%. Namun, NPF perbankan syariah per Desember 2016 tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Non Performing Loan atau kredit macet bank konvensional yang berada pada tingkat 2,93% per Desember 2016. Tingginya angka NPF dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor dari dalam bank sendiri dan dari luar bank seperti masalah naik turunnya perekonomian.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis VAR (*Vector Auto Regression*) atau VECM (*Vector Error Correction Model*). Variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel dependen yaitu NPF bank syariah, sedangkan variabel independen yaitu DPK bank syariah, GDP, Inflasi, dan Kurs. Berikut penjelasannya:

a. Analisis Rasio *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Non Performing Financing atau dalam Perbankan Syariah disebut pembiayaan bermasalah, merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat. *Non Performing Financing* dapat menunjukkan kemampuan bank syariah dalam mengelola pembiayaan. Semakin tinggi rasio *Non*

Performing Financing akan berdampak pada profitabilitas dan kinerja perbankan syariah.

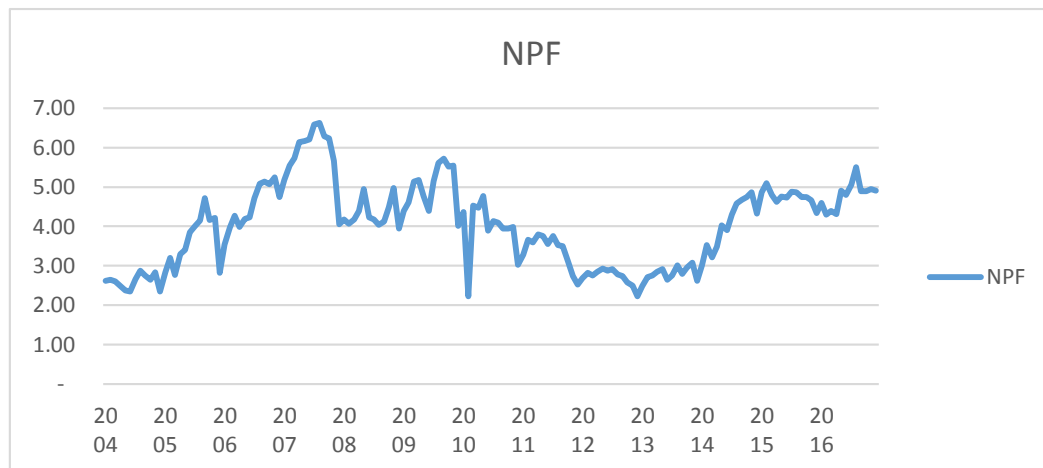
Tabel 4.1 *Non Performing Financing* Bank Syariah di Indonesia dalam Triwulan (Dalam %)

Periode	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2004	2,62	2,4	2,76	2,61
2005	2,93	3,52	4,29	3,73
2006	3,92	4,31	4,97	5,02
2007	5,48	6,17	6,5	5,31
2008	4,14	4,52	4,11	4,47
2009	4,71	4,77	5,49	5,02
2010	3,7	4,37	4,06	3,65
2011	3,51	3,7	3,59	2,79
2012	2,75	2,88	2,81	2,43
2013	2,65	2,8	2,85	2,88
2014	3,25	3,8	4,51	4,64
2015	4,92	4,7	4,82	4,58
2016	4,43	4,67	5,14	4,91

Sumber: Bank Indonesia, diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, *Non Performing Financing* Perbankan Syariah di Indonesia cenderung fluktuatif dari awal periode 2004 hingga akhir periode 2016. Pada triwulan 1 periode 2004 rasio NPF berada pada angka 2,62% dan di triwulan 4 periode 2016 rasio NPF berada pada angka 4,91%. Besarnya rasio NPF bank syariah karena pembiayaan yang diberikan semakin meningkat, sedangkan apabila

rasio NPF menurun diakibatkan oleh mitra yang sudah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan.



Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 4.1 *Non Performing Financing* Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat rasio NPF bank syariah di Indonesia mengalami naik turun selama periode 13 tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan rasio pada tahun 2010 dan 2013, namun pada tahun 2014 rasio NPF mulai mengalami kenaikan lagi. Semakin tinggi rasio NPF bank syariah maka semakin menurun kinerja bank syariah tersebut.

b. Analisis rasio Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang diperoleh bank dari simpanan masyarakat yang dapat berupa tabungan *mudharabah* atau tabungan *wadiah*, deposito *mudharabah*, dan giro *wadiah*. Semakin besar jumlah DPK yang dapat dihimpun bank, maka kewajiban bank yang harus diberikan kepada nasabah juga semakin bertambah. Oleh

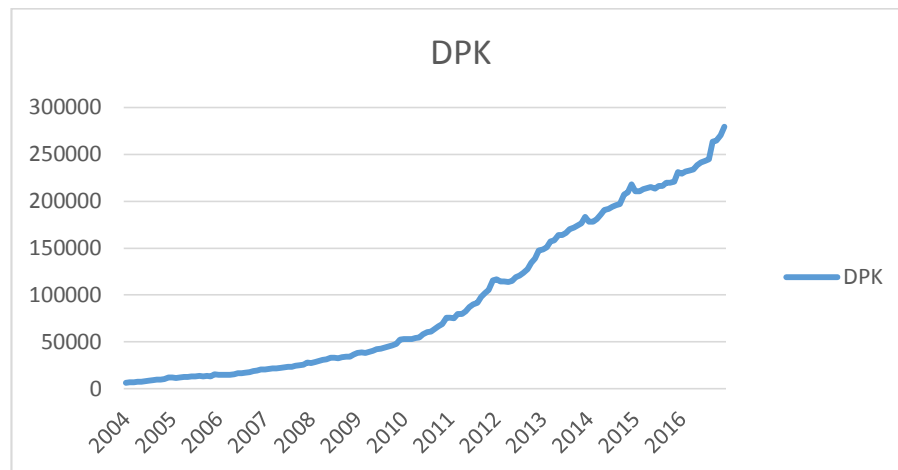
karena itu, bank harus memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Untuk memiliki likuiditas yang cukup, bank dapat mendapatkannya melalui pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank atau kegiatan lain yang dapat menghasilkan profit untuk bank.

Tabel 4.2 Data Triwulan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)

Periode	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2004	6820	7812	9235	10840
2005	11970	12998	13432	14218
2006	14987	15668	17196	19625
2007	21150	22430	23739	26380
2008	28659	31939	32941	35130
2009	38295	40528	44134	48886
2010	53091	55729	61782	70533
2011	76850	83151	93187	107518
2012	115150	116167	124123	140212
2013	152163	162114	169458	177948
2014	179009	189295	195799	211541
2015	211348	214263	217339	223762
2016	231190	237836	250516	271497

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data diolah, 2017

Dilihat dari tabel tersebut, jumlah DPK Bank Syariah terus mengalami kenaikan. Pada Triwulan 1 periode 2004 tercatat jumlah DPK yang berhasil dihimpun sebesar Rp 6.820 Triliun dan pada Triwulan 4 periode 2016, bank syariah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga sebesar Rp 271.497 Triliun.



Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 4.2 DPK Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah DPK bank syariah terus mengalami kenaikan hingga periode 2016. Dengan semakin meningkatnya jumlah DPK bank syariah itu artinya semakin banyak nasabah yang sudah mempercayakan dananya untuk dititipkan di bank syariah. Besarnya jumlah DPK yang dihimpun bank syariah, maka bank juga dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya yaitu untuk memenuhi kewajibannya kepada pemilik dana yang menempatkan uangnya di bank syariah.

c. Analisis *Gross Domestic Bruto* (GDP) Indonesia

Gross Domestic Bruto (GDP) digunakan untuk menggambarkan tingkat pendapatan nasional. GDP adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh perekonomian dalam satu periode. GDP diperoleh dari barang dan jasa yang dihasilkan produsen

atau usaha dalam negeri. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai GDP maka perekonomian nasional akan tinggi khususnya para produsen–produsen tersebut. Artinya, jika tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat diharapkan dapat menekan persentase rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Tabel 4.3 Data Triwulan *Gross Domestic Bruto* (GDP) Indonesia
(Dalam Miliar Rupiah)

Periode	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2004	402597	411936	423852	418132
2005	426612	436121	448598	439484
2006	448485	457637	474904	466101
2007	475533	488026	506168	493365
2008	505243	519359	538567	518935
2009	528056	540677	561637	548479
2010	559683	574712	594250	585812
2011	595721	612500	632823	623519
2012	632800	650600	671500	662000
2013	671300	688900	699900	709500
2014	706600	724100	745600	2161500
2015	2157500	2239300	2311200	2270400
2016	2262600	2428700	2353200	2385600

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2017

Dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah GDP Indonesia fluktuatif, namun tetap dapat dikatakan meningkat. Dari periode Triwulan 1 tahun 2004 tercatat jumlah GDP sebesar Rp 402.597 Triliun, sedangkan pada

periode Triwulan 4 tahun 2016 tercatat jumlah GDP sebesar Rp 2385600 Triliun.



Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 4.3 *Gross Domestic Bruto* Indonesia

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah GDP Indonesia terus meningkat. Peningkatan terutama terlihat pada tahun 2015. Itu berarti bahwa ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan mengalami peningkatan yang nantinya dapat diharapkan dapat menekan prosentase rasio pembiayaan bermasalah.

d. Analisis Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang disebabkan karena adanya kenaikan harga barang-barang maupun jasa secara umum dan terus menerus yang akan dapat menyebabkan ketidak seimbangan antara pengeluaran dan pemasukan ekonomi masyarakat. Kenaikan harga yang terjadi terus menerus dapat berdampak pada menurunnya minat

masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah atau lembaga keuangan lainnya, selain itu juga dapat membuat kemampuan nasabah bank menjadi lemah dalam memenuhi kewajibannya dalam mengangsur. Hal tersebut dapat menyebabkan tingkat pembiayaan yang kurang lancar menjadi bertambah bahkan bisa menjadi macet dan akan meningkatkan presentase rasio pembiayaan bermasalah.

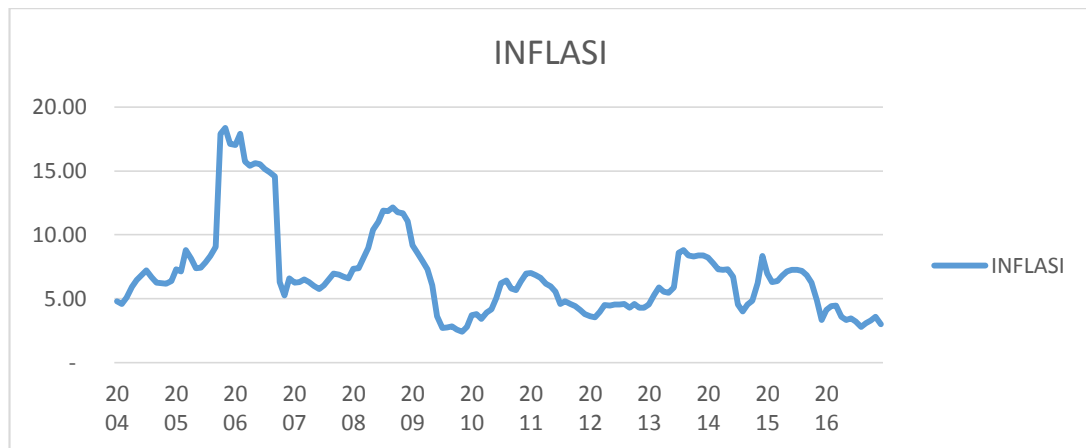
Tabel 4.4 Tingkat Inflasi Triwulan Indonesia (Dalam persen)

Periode	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2004	4,84	6,4	6,71	6,26
2005	7,76	7,64	8,41	17,79
2006	16,89	15,51	14,86	6,05
2007	6,36	6,02	6,5	6,72
2008	7,64	10,12	11,96	11,5
2009	8,56	5,66	2,76	2,58
2010	3,65	4,37	6,15	6,32
2011	6,83	5,89	4,57	4,12
2012	3,72	4,49	4,48	4,41
2013	5,26	5,64	8,6	8,35
2014	7,76	7,09	4,35	6,47
2015	6,54	7,06	7,09	4,83
2016	4,33	3,46	3,02	3,3

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Dilihat dari tabel di atas bahwa presentase tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2004 hingga tahun 2016. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada triwulan 1 tahun 2006 yaitu sebesar

16,89% dan tingkat inflasi terendah terjadi pada periode triwulan 4 pada tahun 2009.



Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 4.4 Tingkat Inflasi Indonesia

Dari grafik diatas dapat dilihat fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia. Indonesia sempat mengalami inflasi yang tinggi pada tahun 2006. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena harga barang dan jasa yang mahal. Selain itu tingkat *saving* juga bisa menjadi turun karena masyarakat lebih memilih untuk menyimpannya di rumah dan membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Akibat dari adanya inflasi, masyarakat juga mengalami kesusahan dalam mengangsur pembiayaan, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap rasio pembiayaan bermasalah bank syariah.

e. Analisis Kurs Indonesia

Kurs merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh mata uang asing. Nilai kurs yang mengalami peningkatan akan berakibat pada krisis ekonomi dalam negeri, seperti meningkatnya tingkat inflasi. Apabila kurs mengalami peningkatan, maka akan berakibat tidak stabilnya usaha yang dijalankan nasabah dengan modal yang didapat dari bank syariah, sehingga kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran menjadi kurang lancar bahkan bisa macet karena harga-harga barang produksi mengalami peningkatan.

Di sisi lain, sebenarnya ketika terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, perbankan syariah menjadi lebih disukai oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan bank syariah selama ini tidak terlalu banyak berkecimpung dalam kegiatan transaksi valuta asing maupun pasar modal, dan lebih fokus pada sektor rill.

Keuntungan yang diperoleh perbankan syariah akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah banyak nasabah baru maupun nasabah bank konvensional yang beralih atau memindahkan dananya ke bank syariah. Hal tersebut terjadi karena para nasabah mengantisipasi apabila bank konvensional mengalami kebangkrutan. Sehingga terjadi peningkatan simpanan dan pengajuan pembiayaan di bank syariah. Selain itu pembiayaan yang ada di perbankan syariah juga cenderung tetap sehingga tidak terlalu terasa

pengaruhnya terhadap naik turunnya kurs, sehingga nasabah akan lebih nyaman dalam menginvestasikan dananya.

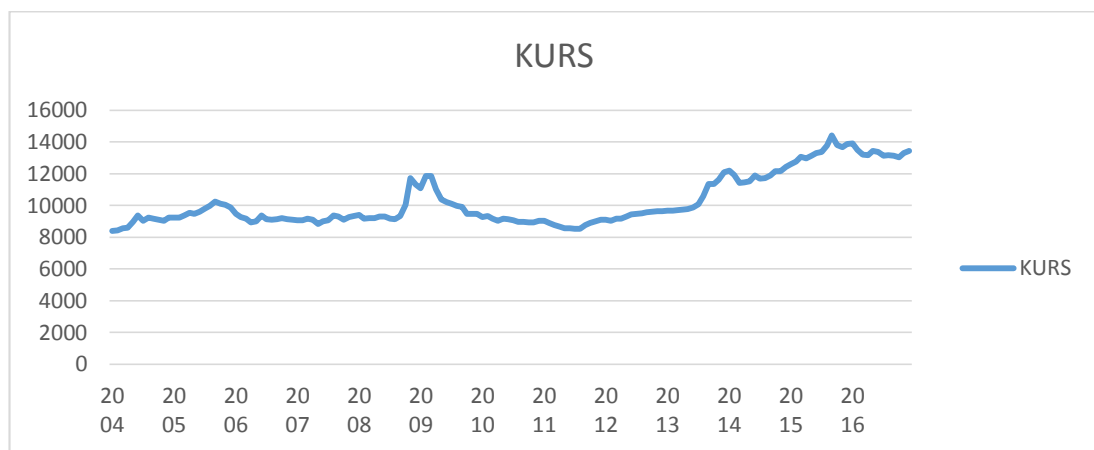
Stabilitas perbankan syariah di tengah naik turunnya kurs disebabkan oleh sistem bagi hasil yang diterapkan. Sistem inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga bank syariah tidak ada kaitannya dengan bunga. Dan dalam sistem bagi hasil, keuntungan kecil maupun besar akan dibagi bersama. Apabila terjadi kerugian juga akan dibagi bersama dengan syarat kerugian tidak disebabkan oleh nasabah sendiri.

Tabel 4.5 Kurs Triwulan Indonesia (Dalam Rupiah)

Periode	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2004	8462	8985	9151	9116
2005	9286	9545	10006	9997
2006	9299	9094	9121	9136
2007	9099	8975	9247	9234
2008	9257	9265	9217	11028
2009	11594	10541	9996	9470
2010	9265	9119	8998	8962
2011	8903	8590	8610	8999
2012	9100	9305	9507	9623
2013	9694	9788	10664	11689
2014	11847	11618	11762	12247
2015	12798	13133	13850	13774
2016	13532	13318	13134	13248

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa kurs Indonesia mengalami fluktuasi, namun tergolong meningkat. Dari periode triwulan 1 tahun 2004 sebesar Rp 8462 rupiah/ US Dollar menjadi Rp 13248 rupiah/US Dollar di triwulan 4 tahun 2016.



Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 4.5 Kurs Indonesia

Dari grafik diatas, Kurs Indonesia terlihat fluktuatif. Kurs tertinggi terjadi pada tahun 2015. Nilai rupiah terhadap mata uang asing yang tinggi menandakan bahwa nilai kurs sedang melemah. Menguat atau melemahnya nilai kurs akan berpengaruh terhadap sistem perekonomian yang nantinya dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menabung di bank syariah dan akan mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah.

2. Analisis Pengujian Statistik

Untuk data Dana Pihak Ketiga (DPK) ditransformasikan ke dalam bentuk logartima agar menghasilkan analisis yang lebih akurat. Dan data GDP yang hanya tersedia dalam triwulan kemudian dilakukan interpolasi data menjadi data bulanan.

a. Uji Stationeritas

Uji stationer dilakukan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi hubungan kointegrasi variabel-variabel yang diteliti. Stationer dari variabel penting karena berpengaruh pada hasil estimasi regresi. Regresi antara variabel-variabel yang tidak stationer akan menghasilkan fenomena regresi palsu, dimana nilai koefisien yang dihasilkan dari estimasi menjadi tidak valid dan sulit untuk dijadikan pedoman. Selain itu, uji stationer dilakukan karena sebagai syarat diterapkannya VAR sehingga estimasi dan pengujian hipotesisnya menjadi valid. Syarat diterapkannya VAR adalah datanya stationer pada derajat nol, dan jika tidak stationer pada derajat nol sepanjang masih berkointegrasi maka dapat diterapkan VAR.

Dalam penelitian ini digunakan *Uji Phillips-Peron* (PP) untuk pengujian stationeritas data dari variabel yang akan diteliti. *Uji Phillips-Peron* (PP) bersifat non parametrik sehingga dapat digunakan untuk banyak kasus dan sampel yang besar, Uji PP juga akan menunjukkan hasil yang bagus.

Uji Hipotesis *Uji Phillips-Peron* (PP):

Ho = data tidak stationer

Ha = data stationer

Ho diterima jika PP test > Critical Value

Ho ditolak jika PP test < Critical Value

Di bawah ini adalah hasil uji stationeritas dari data yang digunakan dalam penelitian menggunakan *Uji Phillips-Peron* (PP):

Tabel 4.6 Hasil Uji PP Data Tingkat Level

Variabel	PP t-Statistic	Critical Value 5%	Prob	Keterangan
ldpk	-3.184132	-2.880088	0.0228	Stationer
GDP	0.137506	-2.880088	0.9676	Tidak Stationer
INFLASI	-2.536773	-2.880088	0.1088	Tidak Stationer
KURS	-0.715231	-2.880088	0.8387	Tidak Stationer
NPF	-2.866353	-2.880088	0.0517	Tidak Stationer

Sumber: Data diolah, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai dari t-Statistic dan critical value 5%. Nilai PP t-statistic akan dibandingkan dengan critical value untuk mengetahui stationeritas suatu variabel dan dengan melihat Prob yaitu harus lebih kecil dari 0.05. Pengujian stationeritas data pada tingkat level terhadap seluruh variabel diketahui bahwa hanya ada 1 variabel yang stationer yaitu variabel *ldpk*. Sedangkan variabel lainnya

mempunyai nilai PP t-statistic yang lebih besar daripada critical value sehingga H_0 diterima, artinya data tidak stationer.

Karena data dari variabel-variabel tersebut hanya ada 1 variabel yang stationer pada tingkat level, maka perlu dilakukan *difference non stationary processes* untuk menstationerkan data-data tersebut yang belum stationer. Untuk menyatakan data tersebut stationer maka dilihat dengan membandingkan antara nilai t-statistic dengan critical value sebesar 5%, serta dengan melihat Prob-nya yaitu harus lebih kecil dari 0.05. Jika nilai PP t-statistic lebih kecil dari critical value pada *first difference* maka data dapat dikatakan stationer pada *first difference*. Tetapi jika nilainya lebih besar, maka uji derajat integrasi dilanjutkan pada diferensi yang lebih tinggi hingga diperoleh data stationer.

Berikut hasil *Uji Phillips-Peron (PP)* pada *1st difference*:

Tabel 4.7 Hasil *Uji Phillips-Peron (PP)* pada *1st difference*:

Variabel	PP t-Statistic	Critical Value 5%	Prob	Keterangan
ldpk	-11.98125	-2.880088	0.0000	Stationer
GDP	-6.334111	-2.880088	0.0000	Stationer
INFLASI	-10.06900	-2.880088	0.0000	Stationer
KURS	-9.882786	-2.880088	0.0000	Stationer
NPF	-16,94421	-2.880088	0.0000	Stationer

Sumber: Data diolah, 2017

Dilihat dari tabel di atas, melalui uji stationeritas pada tingkat *first difference* bahwa nilai PP t-statistic lebih kecil dibandingkan

critical value. Sehingga hipotesis H_0 ditolak yang artinya data stationer pada tingkat *first difference*.

Untuk membuat model VAR, syarat yang harus dipenuhi adalah seluruh variabel stationer pada tingkat level atau salah satu variabel stationer pada tingkat level dan lainnya pada tingkat *difference*, atau dapat juga semua data stationer pada tingkat *difference* yang sama, namun dengan syarat harus tidak saling berkointegrasi (menggunakan VAR *in difference*). Karena jika semua stationer pada tingkat *difference* yang sama dan saling berkointegrasi, maka model VAR tidak dapat digunakan, dan yang digunakan adalah model VECM.

b. Penentuan Panjang Lag

Dalam melakukan pendekatan VAR maupun VECM, pemilihan jumlah Lag sangat diperlukan. Pemilihan Lag digunakan mengetahui lamanya periode keterpengaruhannya suatu variabel terhadap variabel masa lalunya maupun terhadap variabel endogen lainnya. Lag optimum merupakan cara untuk memilih seberapa besar jumlah Lag yang bisa digunakan dalam penelitian. Penentuan panjang lag juga berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam model VAR. Kriteria yang digunakan dalam penentuan panjang lag yaitu *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SC) dan *Hannan-Quinn Criterion* (HQ).

Tabel 4.8 Hasil Uji Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-4.114.282	NA	1.03e+18	5.566.597	5.576.723	5.570.711
1	-2.886.049	2.356.880	8.94e+10	3.940.607	40.01361*	3.965.291
2	-2.839.727	8.575.840	6.71e+10*	39.11793*	4.023.176	39.57048*
3	-2.829.690	1.790.296	8.24e+10	3.932.014	4.094.026	3.997.839
4	-2.791.090	6.624.707	6.89e+10	3.913.635	4.126.275	4.000.030
5	-2.767.077	3.958.887	7.05e+10	3.914.969	4.178.237	4.021.934
6	-2.756.784	1.627.466	8.71e+10	3.934.843	4.248.740	4.062.378
7	-2.729.841	4.077.746	8.64e+10	3.932.218	4.296.744	4.080.324
8	-2.702.402	39.67585*	8.57e+10	3.928.921	4.344.076	4.097.598

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa menurut kriteria FEP, AIC, dan HQ bahwa panjang lag terletak pada lag 2. Karena ketiga kriteria menunjukkan hasil yang sama, maka panjang lag yang dipilih adalah lag 2.

c. Pengujian Stabilitas VAR

Stabilitas VAR perlu diuji karena jika hasil estimasi stabilitas VAR tidak stabil maka analisis IRF dan FEVD menjadi tidak valid, begitu juga sebaliknya apabila stabilitas VAR stabil, maka uji IRF dan FEVD juga valid. Suatu sistem VAR dikatakan stabil apabila seluruh akar atau *root*-nya memiliki modulus lebih kecil dari satu.

Pengujian yang dilakukan adalah dengan dilakukan VAR *Stability Condition Check* berupa *Roots of Charateristic Polynomial*.

Berikut hasil pengujian berdasarkan hasil *AR Root Table*

Tabel 4.9 Hasil Uji Stabilitas VAR

Root	Modulus
0.989528	0.989528
0.981771	0.981771
0.904948 - 0.046640i	0.906149
0.904948 + 0.046640i	0.906149
0.701837 - 0.136262i	0.714943
0.701837 + 0.136262i	0.714943
0.236532 - 0.064634i	0.245204
0.236532 + 0.064634i	0.245204
-0.239449	0.239449
-0.165897	0.165897

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai akar karakteristik atau modulus semuanya menunjukkan angka kurang dari satu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut stabil.

d. Uji Kointegrasi

Setelah menentukan Panjang Lag Optimum dan pengujian stabilitas, selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan Uji Kointegrasi. Uji Kointegrasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang, yaitu ada atau tidak kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *Johansen Cointegration Test* untuk melihat ada tidaknya kointegrasi.

Tabel 4.10 Hasil Uji Kointegrasi ldpk, NPF, GDP, INFLASI, dan KURS

Hypothesized	Eigenvalue	Trace	0.05	Prob.**
No. of CE(s)		Statistic	Critical Value	
None *	0.225250	71.52902	69.81889	0.0363
At most 1	0.101203	32.48119	47.85613	0.5856
At most 2	0.070856	16.15638	29.79707	0.7013
At most 3	0.019880	49.12202	15.49471	0.8181
At most 4	0.011954	18.39.987	38.41466	0.1750

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Hypothesized	Eigenvalue	Max-Eigen	0.05	Prob.**
No. of CE(s)		Statistic	Critical Value	
None *	0.225250	39.04783	33.87687	0.0110
At most 1	0.101203	16.32481	27.58434	0.6381
At most 2	0.070856	11.24417	21.13162	0.6229
At most 3	0.019880	30.72215	14.26460	0.9418
At most 4	0.011954	18.39987	38.41466	0.1750

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel hasil uji kointegrasi di atas, dapat dilihat bahwa variabel-variabel di atas memiliki nilai *trace statistic* dan *Max-eigen* yang lebih besar daripada *critical value*-nya. Dan diantar keempat variabel tersebut masing-masing terdapat 1 kointegrasi pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel memiliki hubungan jangka panjang atau berkointegrasi.

e. Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Grenger dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang diteliti memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Maksudnya adalah apakah satu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lain secara signifikan, karena setiap variabel memiliki kesempatan untuk menjadi variabel endogen maupun variabel eksogen. Pada uji ini, peneliti menggunakan *Pairwise Granger Causality Test* dan menggunakan taraf nyata 5%.

Tabel 4.11 Hasil *Granger Causality Test*

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
NPF does not Granger Cause LDPK	154	0.47198	0.6247
LDPK does not Granger Cause NPF		0.08623	0.9174
GDP does not Granger Cause LDPK	154	0.68476	0.5058
LDPK does not Granger Cause GDP		2.38331	0.0958
INFLASI does not Granger Cause LDPK	154	2.47021	0.0880
LDPK does not Granger Cause INFLASI		3.19968	0.0436
KURS does not Granger Cause LDPK	154	2.19271	0.1152
LDPK does not Granger Cause KURS		1.27627	0.2821
GDP does not Granger Cause NPF	154	0.15662	0.8552
NPF does not Granger Cause GDP		0.64641	0.5254
INFLASI does not Granger Cause NPF	154	1.40736	0.2480
NPF does not Granger Cause INFLASI		0.93734	0.3940
KURS does not Granger Cause NPF	154	0.92627	0.3983
NPF does not Granger Cause KURS		1.01069	0.3664
INFLASI does not Granger Cause GDP	154	1.01153	0.3661
GDP does not Granger Cause INFLASI		1.87584	0.1568
KURS does not Granger Cause GDP	154	3.95232	0.0213
GDP does not Granger Cause KURS		2.23939	0.1101
KURS does not Granger Cause INFLASI	154	1.93955	0.1474
INFLASI does not Granger Cause KURS		0.19280	0.8249

Sumber: data diolah, 2017

Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa yang memiliki hubungan kausalitas adalah yang memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga nanti H_0 ditolak yang artinya suatu variabel akan mempengaruhi variabel lain. Berikut adalah hasil dari pengujian kausalitas granger:

- 1) Variabel $ldpk$ secara statistik tidak signifikan mempengaruhi NPF dan begitu juga sebaliknya variabel NPF tidak signifikan mempengaruhi $ldpk$ dengan bukti nilai Prob masing-masing lebih besar dari 0.05 yaitu 0.6247 dan 0.9174, sehingga tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel.
- 2) Variabel $ldpk$ tidak signifikan mempengaruhi GDP (0.5058), sehingga H_0 diterima, sedangkan variabel GDP secara statistik tidak signifikan mempengaruhi $ldpk$ (0.0958) sehingga H_0 diterima. Kesimpulannya tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel
- 3) Variabel $ldpk$ secara statistik tidak signifikan mempengaruhi inflasi (0.0880), sehingga H_0 diterima, sedangkan variabel inflasi signifikan mempengaruhi $ldpk$ (0.0436) sehingga H_0 ditolak. Kesimpulannya terjadi kausalitas searah yaitu hanya inflasi yang signifikan mempengaruhi $ldpk$, tidak berlaku untuk sebaliknya.
- 4) Variabel $ldpk$ tidak signifikan mempengaruhi kurs (0.1152), sehingga H_0 diterima, sedangkan variabel kurs secara statistik tidak signifikan mempengaruhi $ldpk$ (0.2821) sehingga H_0 diterima. Kesimpulannya tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel

- 5) Variabel NPF secara statistik tidak signifikan mempengaruhi GDP (0.8552), sehingga H_0 diterima, sedangkan variabel GDP tidak signifikan mempengaruhi NPF (0.5254) sehingga H_0 diterima. Kesimpulannya tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel
- 6) Variabel NPF tidak signifikan mempengaruhi Inflasi (0.2480), sehingga H_0 diterima, sedangkan variabel Inflasi secara statistik tidak signifikan mempengaruhi NPF (0.3940) sehingga H_0 diterima. Kesimpulannya tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel
- 7) Variabel NPF secara statistik tidak signifikan mempengaruhi KURS (0.3983), sehingga H_0 diterima, sedangkan variabel KURS secara statistik tidak signifikan mempengaruhi NPF (0.3664) sehingga H_0 diterima. Kesimpulannya tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel
- 8) Variabel GDP secara statistik tidak signifikan mempengaruhi inflasi (0.3661), sehingga H_0 diterima, sedangkan variabel Inflasi secara statistik tidak signifikan mempengaruhi GDP (0.1568) sehingga H_0 diterima. Kesimpulannya tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel
- 9) Variabel GDP secara statistik signifikan mempengaruhi Kurs (0.0213), sehingga H_0 ditolak, sedangkan variabel Kurs secara statistik tidak signifikan mempengaruhi GDP (0.1101) sehingga H_0 diterima. Kesimpulannya terjadi kausalitas searah yaitu GDP signifikan mempengaruhi Kurs, tapi tidak berlaku untuk sebaliknya.

10) Variabel Inflasi secara statistik tidak signifikan mempengaruhi Kurs (0.1474), sehingga H_0 diterima, sedangkan variabel Kurs secara statistik tidak signifikan mempengaruhi Inflasi (0.8249) sehingga H_0 diterima. Kesimpulannya tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel

f. Hasil Estimasi VECM

Berdasarkan uji kointegrasi, model yang tepat untuk menganalisis hubungan antara variabel DPK, GDP, Inflasi dan Kurs terhadap NPF adalah VECM. Panjang lag optimal atau kelambanan optimal adalah 2.

Hasil estimasi VECM akan didapat hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara NPF, DPK, GDP, Inflasi dan Kurs. Pada estimasi ini NPF merupakan variabel dependen, sedangkan DPK, GDP, Inflasi, dan Kurs merupakan variabel independent.

Hipotesis yang akan digunakan:

H_0 : Variabel dependen secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen

H_a : Variabel dependen tidak secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen

Wilayah tolak H_0 : nilai t-hitung < probabilitas (1%,5%, atau 10%) atau nilai t-hitung > - probabilitas (1%,5%, atau 10%).

Tabel 4.12 Hasil Estimasi VECM

Variabel	Koefisien	T-statistik	Keterangan
Jangka Pendek			
CointEq1	-0.013373	[-0.73185]	TS
D(NPF(-1))	-0.276266	[-2.82170]	Signifikan
D(NPF(-2))	0.059827	[0.60936]	TS
D(LDPK(-1))	-0.748060	[-0.44077]	TS
D(LDPK(-2))	-0.484768	[-0.28368]	TS
D(GDP(-1))	-6.50E-09	[-0.01286]	TS
D(GDP(-2))	1.67E-07	[0.32814]	TS
D(INFLASI(-1))	-0.029153	[-0.91185]	TS
D(INFLASI(-2))	-0.043889	[-1.37518]	TS
D(KURS(-1))	-3.46E-05	[-0.24070]	TS
D(KURS(-2))	0.000103	[0.70986]	TS
C	0.043317	[0.60378]	TS
Jangka Panjang			
NPF(-1)	1000000		
LDPK(-1)	2.039557	[4.41788]	Signifikan
GDP(-1)	-1.24E-06	[-1.12705]	TS
INFLASI(-1)	0.392321	[3.33613]	Signifikan
KURS(-1)	0.000610	[1.32452]	TS
C	-34.33375		

Sumber: Data diolah (TS = Tidak Signifikan), 2017

Tabel 4.13 T-tabel

Probabiliy	1%	5%	10%
Nilai T-Tabel	2.60878	1,97580	1.65501

Sumber: dari tabel T, 2017

Berdasarkan hasil yang dihasilkan pada tabel, pada jangka pendek terdapat 1 variabel yang signifikan pada taraf 1%, 5%, maupun 10%. Satu variabel tersebut adalah NPF pada lag 1. Sedangkan untuk estimasi jangka panjang, menunjukkan bahwa ada 2 variabel yang signifikan yaitu LDPK pada lag 1 dan Inflasi pada lag 1.

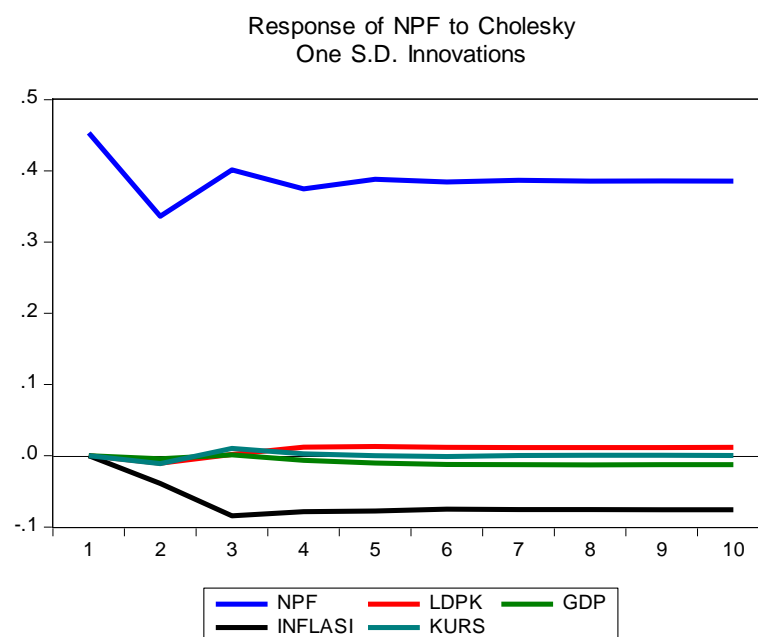
Pada jangka panjang inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap NPF yaitu sebesar 0.3%. Artinya jika terjadi kenaikan inflasi maka akan menyebabkan NPF naik sebesar 0.3%.

Variabel DPK dan inflasi memiliki hubungan jangka panjang dengan NPF, karena t-hitungnya lebih besar daripada t-tabel, dan variabel GDP, dan Kurs tidak memiliki hubungan jangka panjang karena t-hitung lebih kecil dari t-tabel. Sedangkan untuk jangka pendek, semua variabel tidak memiliki hubungan jangka pendek karena t-hitung lebih kecil daripada t-tabel.

g. *Impulse Response Function (IRF)*

Impulse Response Function (IRF) digunakan untuk menjelaskan dampak dari guncangan (shock) pada suatu variabel terhadap variabel lain, dimana dalam analisis ini tidak hanya dalam jangka waktu pendek

tetapi dapat menganalisis dinamika jangka panjang. Analisis *Impulse Response Function* (IRF) juga berfungsi untuk melihat berapa lama pengaruh tersebut terjadi. Uji IRF ini ditunjukkan dengan grafik, jika grafik IRF berada di atas titik keseimbangan, maka respon variabel yang dianalisis adalah positif atau mengalami kenaikan, sedangkan jika grafik IRF berada di bawah titik keseimbangan, maka respon variabel adalah negatif atau mengalami penurunan.



Gambar 4.6 Uji *Impulse Response Function* (IRF)

Berdasarkan analisis gambar di atas, dapat dilihat hasil uji IRF menunjukkan respon NPF terhadap guncangan dari nilai variabel DPK, GDP, Inflasi, dan Kurs. berikut keterangan dari gambar di atas:

- 1) Respon NPF yang diterima terhadap guncangn DPK adalah positif. Dikatakan positif karena menurut grafik IRF, garis

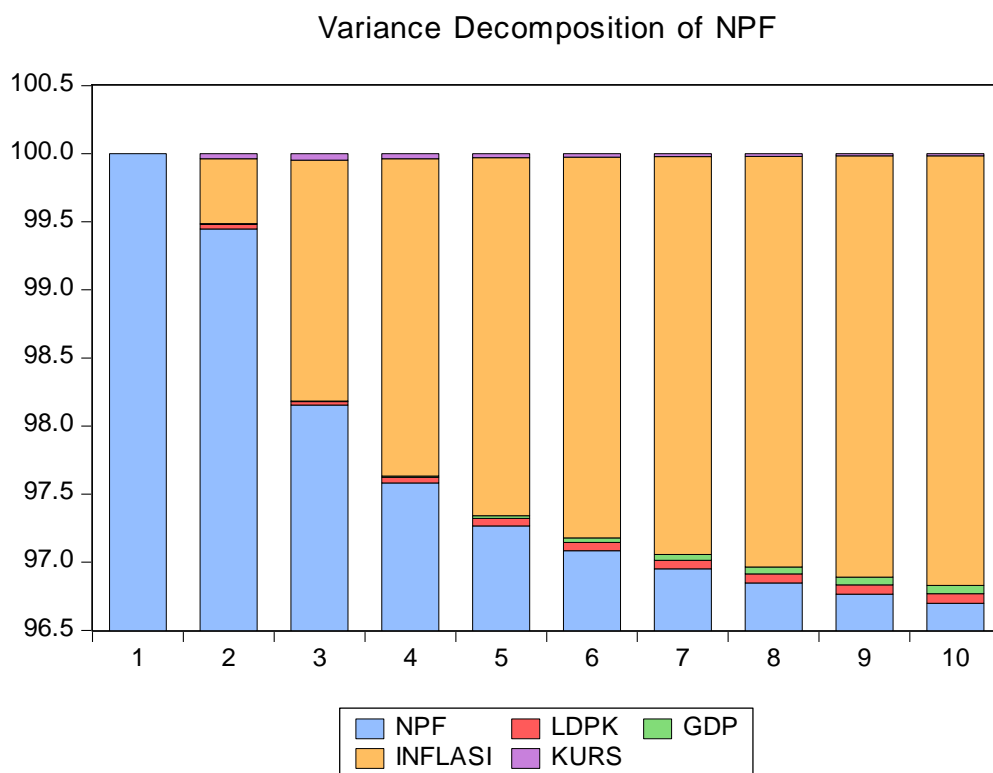
respon DPK terhadap shock yang terjadi pada NPF berada di atas garis horizontal. Grafik IRF juga menunjukkan respon NPF terhadap DPK dari awal periode hingga akhir periode positif stagnan dari titik awal -0.010564 menjadi 0.011695 di akhir periode.

- 2) Respon NPF yang diterima terhadap guncangn GDP adalah tidak merespon. Dikatakan tidak merespon karena menurut grafik IRF, garis respon GDP terhadap shock yang terjadi pada NPF cenderung berada sejajar dengan garis horizontal. Grafik IRF juga menunjukkan respon NPF terhadap GDP dari awal periode hingga akhir periode negatif stagnan dari titik awal 0.000000 menjadi -0.012562 di akhir periode.
- 3) Respon NPF yang diterima terhadap guncangn Inflasi adalah negatif. Dikatakan negatif karena menurut grafik IRF, garis respon Inflasi terhadap shock yang terjadi pada NPF berada di bawah garis horizontal. Grafik IRF juga menunjukkan respon NPF terhadap Inflasi dari awal periode hingga akhir periode negatif stagnan dari titik awal 0.000000 menjadi -0.075835 di akhir periode.
- 4) Respon NPF yang diterima terhadap guncangn Kurs adalah tidak merespon. Dikatakan tidak merespon karena menurut grafik IRF, garis respon Kurs terhadap shock yang terjadi pada NPF cenderung berada sejajar dengan garis horizontal. Grafik IRF

juga menunjukkan respon NPF terhadap Kurs dari awal periode hingga akhir periode positif stagnan dari titik awal 0.000000 menjadi 0.000753 di akhir periode.

h. Analisis *Variance Decomposition* (VD)

Variance Decomposition bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi atau komposisi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.



Gambar 4.7 Hasil Uji *Variance Decomposition*

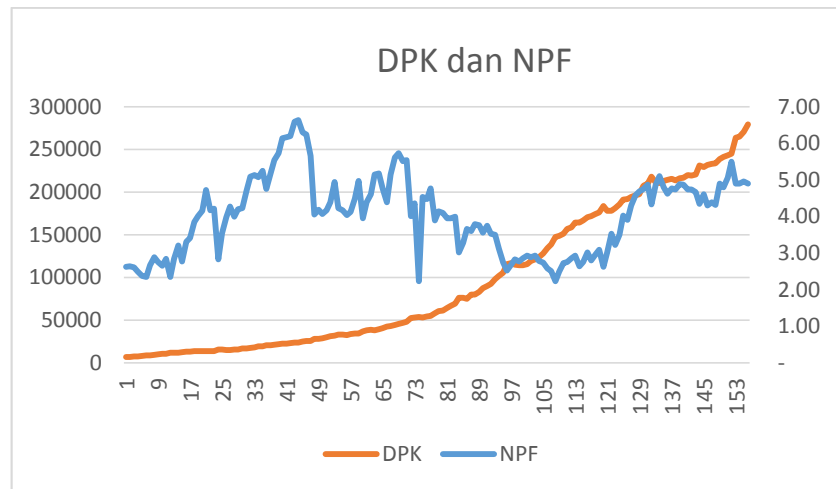
Berdasarkan hasil VD di atas dapat diketahui bahwa NPF lebih dominan dipengaruhi oleh NPF itu sendiri dengan komposisi 100% pada periode pertama kemudian menurun menjadi 96% di akhir periode.

Faktor lain yang mempengaruhi NPF adalah inflasi, pada periode ke 3 dengan kontribusi 1.8% dan terus naik menjadi 3.2% di akhir periode. DPK di periode 2 berkontribusi sebesar 0.03 % dan di periode akhir sebesar 0.07%. Sedangkan untuk variabel GDP diakhir periode hanya berkontribusi sebesar 0.06%, dan variabel Kurs hanya sebesar 0.01%.

i. Interpretasi

Dari uji stationeritas yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa data variabel NPF, FPK, GDP, Inflasi dan Kurs stationer pada *difference* 1. Kemudian didapat juga panjang lag optimum adalah pada lag 2. Dalam uji kointegrasi, ternyata didapatkan bahwa variabel-variabel tersebut terkointegrasi sehingga menunjukkan adanya hubungan jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan uji kausalitas, tidak semua variabel memiliki hubungan dua arah, namun ada variabel yang memiliki hubungan satu arah yaitu variabel inflasi signifikan mempengaruhi DPK, dan GDP signifikan mempengaruhi Kurs. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model VECM dengan tujuan untuk melihat hubungan antarvariabel.

1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)



Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 4.8 Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing*

Dari grafik tersebut terlihat bahwa secara umum jumlah DPK cenderung naik, sedangkan NPF perbankan syariah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2005 perekonomian Indonesia sedang mengalami kesulitan. Kondisi ini berdampak pada perbankan syariah, yang mana perbankan syariah dihadapkan pada tingginya suku bunga akibat kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi yang terjadi. Akibatnya perbankan syariah harus menghadapi risiko pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional sehingga menyebabkan DPK perbankan syariah turun. Di sisi lain, peningkatan penyaluran pembiayaan dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif karena laju inflasi, menyebabkan NPF perbankan syariah cenderung meningkat.

Dalam manajemen pembiayaan, Dana Pihak Ketiga sangat penting untuk kelangsungan usaha perbankan syariah, karena selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga menjadi lembaga perantara untuk menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan ke masyarakat lain yang membutuhkan, sehingga bank syariah gencar menghimpun Dana Pihak Ketiga. Dari kegiatan pembiayaan tersebut, bank akan mendapatkan keuntungan, keuntungan yang didapatkan bank akan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana.⁴¹ Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, bank kemudian akan menyalurkan pembiayaan, sehingga nantinya akan timbul risiko pembiayaan bermasalah.

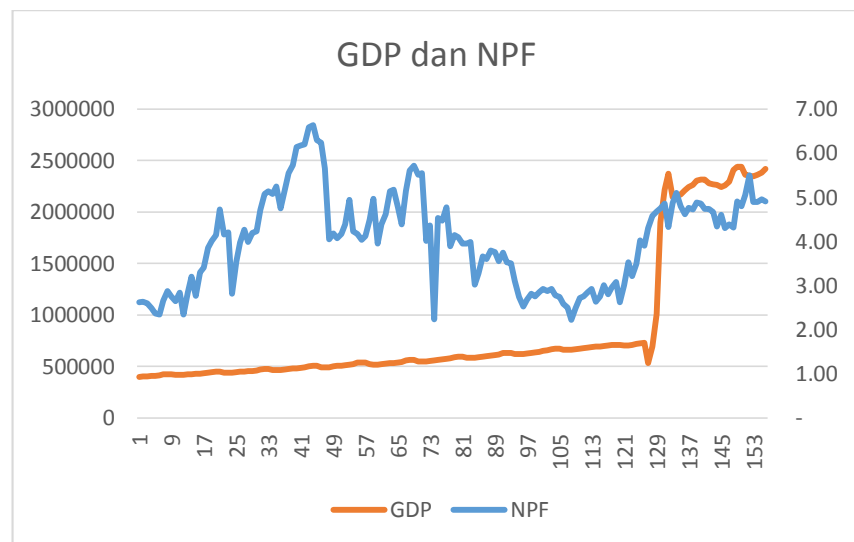
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu berdasarkan hasil estimasi VECM untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel DPK terhadap NPF, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF perbankan syariah karena dapat dilihat pada tabel 4.12 bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel. Sedangkan dalam jangka panjang, DPK berpengaruh positif terhadap NPF Perbankan syariah. Dan dari hasil pengaruh guncangan IRF, NPF merespon positif guncangan DPK. Artinya ketika terjadi guncangan pada

⁴¹ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta; Salemba Empat, 2013) hlm. 87-88

variabel DPK, dalam arti jika jumlah DPK naik, maka rasio NPF akan mengalami kenaikan.

Hal tersebut disebabkan karena ketika terjadi peningkatan jumlah DPK, bank akan meningkatkan penyaluran pembiayaan, namun apabila peningkatan pembiayaan tersebut dilakukan pada saat kondisi perekonomian kurang kondusif terlebih lagi karena inflasi yang tinggi, maka akan menyebabkan naiknya rasio NPF.

2) *Gross Domestic Product (GDP)* terhadap *Non Performing Financing (NPF)*



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 4.9 GDP dan NPF

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan GDP cenderung meningkat. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan meningkat meskipun sering mengalami gejolak akibat dari perekonomian dunia. Seperti tahun 2013, perkembangan perekonomian Indonesia

menghadapi tantangan yang signifikan dari perubahan ekonomi global. Perubahan tersebut diakibatkan oleh penurunan harga komoditas yang menekan permintaan ekspor dari Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan yang menyebabkan penurunan penyaluran pembiayaan, disisi lain juga meningkatkan NPF.

Secara teori GDP mengukur pendapatan setiap orang dalam perekonomian dan pengeluaran total terhadap output barang dan jasa perekonomian. Output barang dan jasa suatu perekonomian bergantung pada jumlah input yaitu faktor-faktor produksi dan kemampuan untuk mengubah input menjadi output. Faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja. Suatu perusahaan menggunakan tenaga kerja dan modal dalam jumlah yang akan memaksimalkan laba. Untuk mendapatkan modal, sebagian perusahaan melakukan pembiayaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang maksimal. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan perusahaan akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Di sisi lain, ketika perusahaan mendapatkan pendapatan yang maksimal, tenaga kerja yang merupakan faktor produksi akan mendapat gaji sesuai kontribusi marginal dalam proses produksi.⁴² Dengan pendapatan yang tinggi, perusahaan maupun pekerja yang mempunyai kewajiban

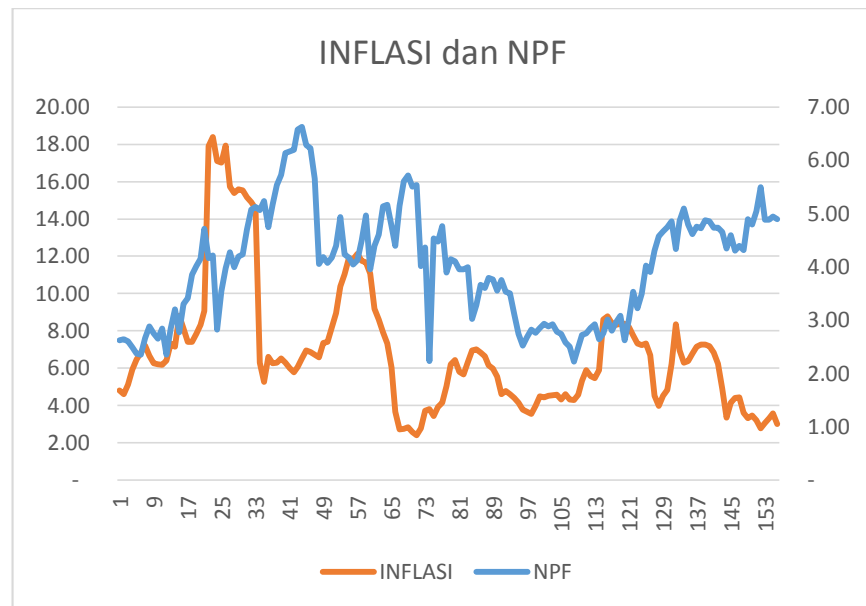
⁴² Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 17-56

pengembalian di bank dapat mengembalikan pinjaman dana tepat waktu, sehingga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu berdasarkan hasil estimasi VECM untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel GDP terhadap NPF, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF perbankan syariah karena dapat dilihat pada tabel 4.12 bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel. Dan dilihat dari hasil uji IRF, NPF cenderung tidak merespon guncangan GDP. Artinya ketika terjadi guncangan pada variabel GDP, dalam arti meningkatnya jumlah GDP, maka rasio NPF hanya akan mengalami penurunan sedikit sekali.

GDP yang besar tidak menjamin kebahagiaan seluruh penduduk suatu negara, tetapi mungkin menjadi alternatif yang terbaik yang ditawarkan para ahli makroekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung ditentukan oleh banyaknya pembiayaan yang diberikan. Di sisi lain, NPF yang tinggi secara langsung lebih diakibatkan karena gejolak inflasi dalam jangka panjang.

3) Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)



Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 4.10 Inflasi dan NPF

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan Inflasi dan NPF mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006, kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan akibat dampak kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005. Naiknya harga BBM dikarenakan harga minyak didunia sedang naik. Oleh karena itu, pada tahun 2006 terjadi inflasi yang tinggi. Sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun dan harga produksi menjadi tinggi. Hal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah yang tercermin dari meningkatnya NPF pada periode setelahnya.

Secara teori, inflasi merupakan kenaikan dalam tingkat harga rata-rata dan harga adalah tingkat dimana uang dipertukarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli tenaga kerja tergantung

pada produktifitas marginal tenaga kerja, bukan pada berapa banyak uang yang dicetak pemerintah. Jika bank sentral menurunkan tingkat inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak akan melihat upah mereka naik dengan cepat. Padahal ketika inflasi melambat, perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk mereka dan akan memberi pekerja kenaikan upah yang lebih kecil.⁴³ Namun, apabila laju inflasi terlalu tinggi dapat mengakibatkan kenaikan besar-besaran dalam tingkat harga yang menyebabkan daya beli masyarakat akan turun, diikuti dengan turunnya produksi barang. Bagi perusahaan yang mempunyai pembiayaan di perbankan akan kesulitan dalam memasarkan produksinya dengan harga yang tinggi, sehingga debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman.

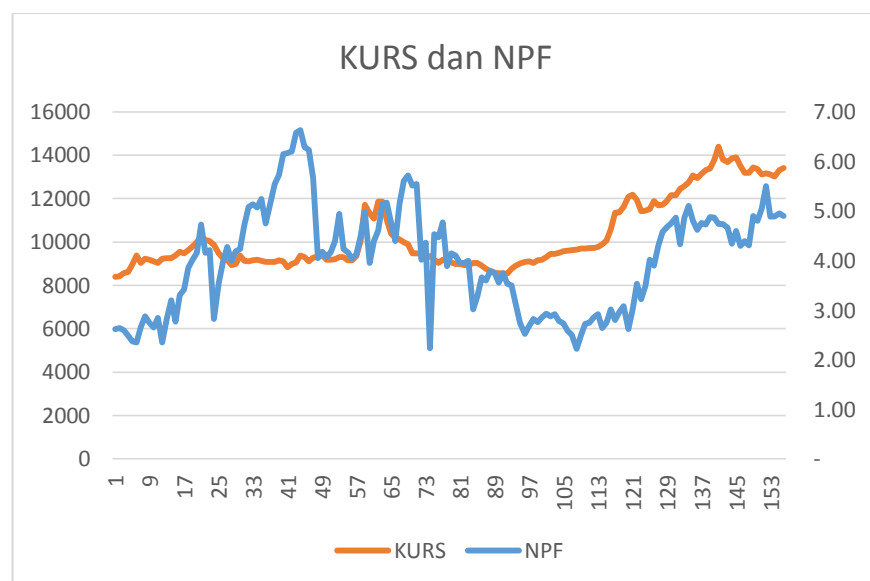
Berdasarkan hasil estimasi VECM jangka pendek inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap NPF karena t-hitung lebih kecil daripada t-tabel. Sedangkan dalam jangka panjang variabel inflasi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF karena t-hitung inflasi lebih besar dari t-tabel. Artinya dalam jangka panjang jika inflasi tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah, maka akan membuat rasio NPF perbankan syariah menjadi naik. Hal tersebut disebabkan ketika terjadi inflasi yang tinggi dan perbankan terus menyalurkan pembiayaan, maka cenderung akan

⁴³ *Ibid*, hlm 95

meningkatkan NPF perbankan syariah, karena harga barang dan jasa secara umum akan naik dan mempengaruhi kualitas pembiayaan.

Tetapi berbeda dengan hasil uji IRF. NPF merespon negatif guncangan Inflasi. Artinya ketika terjadi guncangan pada variabel inflasi, maka rasio NPF akan menurun. Ini dikarenakan jika terjadi inflasi, perbankan syariah akan menurunkan tingkat bagi hasil pembiayaan sehingga pembiayaan akan meningkat. Dengan meningkatnya pembiayaan, maka akan menurunkan rasio NPF. Ini mengindikasikan bahwa inflasi dapat berpengaruh baik pada produsen bila pendapatan yang diperolehnya lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi, sehingga nasabah tetap bisa mengembalikan pembiayaannya.

4) Kurs terhadap *Non Performing Financing* (NPF)



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 4.11 Kurs dan NPF

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kurs dan NPF fluktuatif. Pada tahun 2005, secara keseluruhan nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami tekanan depresiasi yang besar. Hal tersebut terjadi karena penguatan moneter yang mendorong penguatan dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Sehingga menyebabkan perekonomian mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut memicu perlambatan perbankan syariah meskipun tidak signifikan.

Secara teori, kurs adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Kurs yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar terhadap Dollar Amerika, sehingga kurs yang digunakan adalah kurs nominal. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Kurs nominal bergantung pada kurs riil dan tingkat bunga pada kedua negara. Selain itu pertumbuhan jumlah uang akan meningkatkan harga barang yang diukur dengan uang, pertumbuhan itu cenderung meningkatkan harga mata uang asing yang diukur dengan kurs mata uang domestik. Kurs erat kaitannya dengan kegiatan antar negara seperti ekspor dan impor. Dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah dapat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan, karena biaya impor yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi.⁴⁴ Ketika terjadi depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar muncul

⁴⁴ *Ibid*, hlm 128-140

kemungkinan nasabah yang memiliki pinjaman di bank akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan, sehingga timbul risiko pembiayaan bermasalah.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu berdasarkan hasil estimasi VECM untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel Kurs terhadap NPF, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF perbankan syariah karena dapat dilihat pada tabel 4.12 bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel.

Dari hasil uji IRF, NPF merespon negatif guncangan Kurs. Artinya ketika terjadi guncangan pada variabel kurs, atau kurs mengalami depresiasi, maka rasio NPF akan menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan kurs dalam negeri menjadi lebih kompetitif, karena harga barang dan jasa dalam negeri menjadi lebih rendah daripada harga barang pada negara lain. Harga barang dan jasa dalam negeri yang rendah akan meningkatkan permintaan luar negeri, sehingga penjualan dalam negeri akan meningkatkan keuangan masyarakat. Dengan demikian, sisi baik dari naiknya inflasi dapat membantu nasabah dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan bank syariah.